

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Kontingensi

Teori kontingensi adalah teori kesesuaian pimpinan yang berarti menyesuaikan pemimpin dengan kondisi yang tepat. Teori yang dikemukakan oleh Fiedler's ini berpendapat bahwa kinerja pemimpin ditentukan dari pemahamannya terhadap situasi dimana mereka memimpin. Teori kontingensi dapat digunakan untuk menganalisis desain dan sistem akuntansi manajemen untuk memberikan informasi yang dapat digunakan perusahaan untuk berbagai macam tujuan (Otley, dalam Wulandari, 2011). Dimana terdapat beberapa keterlibatan dari variabel yang ada, salah satunya adalah variabel moderating, yaitu jenis variabel yang bisa memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen. Suatu variabel independen dan dependen bisa menghasilkan hubungan negatif atau positif tergantung pada variabel yang memoderasinya. Pendekatan ini dapat memberikan informasi mengenai sifat hubungan yang ada di dalam suatu partisipasi anggaran dengan kinerja berbeda antara situasi dengan situasi lainnya.

Sisay dalam Husin (2012) menyatakan bahwa teori kontingensi adalah desain sistem kontrol yang bersifat kontingen terhadap kontekstual setting organisasi tempat sistem kontrol tersebut akan beroperasi. Faktor kondisional tersebut dapat dikelompokkan ke dalam empat variabel yaitu kultur, organisasional, interpersonal, dan individual. Sumarno, Suhartono dan Solichin dalam Husin (2012) meneliti hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, dengan menggunakan variabel kontingensi sebagai pemoderasi, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel kontingensi menjadi pemoderasi terhadap hubungan antara variabel tersebut. Pendekatan teori kontingensi yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah. Faktor kontingensi yang dipilih adalah rotasi pekerjaan dan job relevant information

Berdasarkan teori di atas, pihak Usaha Mikro Kecil Menengah akan menyusun laporan keuangan atau menyajikan laporan keuangan berbasis SAK EMKM atas dasar desakan dari pihak eksternal untuk tujuan pengembangan usahanya dan dari pihak internal untuk tujuan evaluasi kegiatan usaha yang dilakukan.

2.2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.2.1 Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Undang-Undang No 20 Tahun 2008 menjelaskan bahwa usaha mikro merupakan pakana usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan untuk usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau yang menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Pengertian usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Bentuk UMKM dapat berupa perusahaan perseorangan, persekutuan, seperti misalnya Firma, CV, maupun perseroan terbatas. UMKM dapat dikategorikan menjadi tiga terutama berdasar jumlah aset dan omzet sebagaimana tercantum di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM sebagai berikut (Hardono, 2010).

1. Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan maupun badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria yaitu memiliki aset maks sebesar Rp50 juta dan omzet maks sebesar Rp. 300 juta.
2. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria memiliki Aset maks sebesar Rp. 500 juta dan Omzet maks sebesar Rp. 2,5 M.

3. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan maupun badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria memiliki aset maksimal sebesar 2,5 M dan omzet maksimal sebesar Rp50 M.

Adapun pengembangan usaha yang telah dirumuskan dalam peraturan pemerintah yaitu sebagai berikut:

1. Pengembangan usaha dilakukan terhadap UMKM meliputi:
 - Fasilitas pengembangan usaha
 - Pelaksanaan pengembangan usaha
 - Kegiatan pengembangan
 - Prioritas, intensitas, dan jangka waktu

Pelaksanaan ini dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi.

Adapun pengembangan UMKM ini dilakukan melalui:

1. Pendataan, indentifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi
2. Penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi
3. Pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan
4. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program

Tabel 2.1
Karakteristik UMKM

Ukuran Usaha	Karakteristik
Usaha Mikro	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis barang tidak selalu tetap (sewaktu-waktu dapat berganti) • Tempat usahanya tidak selalu menetap (sewaktu-waktu dapat pindah tempat) • Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun • Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha • Sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai • Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah • Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian sudah akses ke lembaga keuangan non bank • Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP
Usaha Kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis barang yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak mudah berubah • Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah • Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana • Keuangan perusahaan sudah mulai

	<p>dipisahkan dengan keuangan keluarga</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sudah membuat neraca usaha • Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP • Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha • Sebagian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal
Usaha Menengah	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain: bagian keuangan bagian pemasaran, dan bagian produksi • Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan system akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk <i>auditing</i> dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan • Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan • Sudah memiliki persyaratan legalitas antara lain izin tetangga • Sudah memiliki akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan • Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik

Sumber: Profil Bisnis UMKM (Bank Indonesia, 2015)

2.2.2 Kendala yang dihadapi UMKM

Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia tidak lepas dari berbagai masalah. Fenomena masalah yang sering terjadi dan banyak dihadapi oleh para pengelola UMKM salah satunya adalah masalah permodalan untuk mengembangkan usaha yang sangat kompetitif sehingga produk juga harus diperkuat. Masih banyak pengusaha kecil yang belum melakukan pencatatan atas laporan keuangan usahanya dengan baik, bahkan ada juga yang tidak melakukan pencatatan laporan keuangan pada usahanya sendiri. Para pengusaha kecil dan menengah biasanya hanya mengerjakan pembukuan sebatas pencatatan pendapatan dan pengeluaran saja. Akibatnya, laba bersih perusahaan sulit diperoleh, sehingga pengajuan kredit ke bank untuk modal usaha sulit diperoleh, dikarenakan sebagian besar dari pelaku UMKM memiliki keterbatasan-keterbatasan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Kementerian Koperasi dan UMKM, 2013).

Rudiantoro dan Siregar (2011) berpendapat mengenai permasalahan yang dihadapi UMKM antara lain latar belakang pendidikan yang tidak mengenal mengenai akuntansi atau tata buku, kurang disiplin dan rajinnya dalam pelaksanaan pembukuan akuntansi, hingga tidak adanya kecukupan dana untuk mempekerjakan akuntan atau membeli software akuntansi untuk mempermudah pelaksanaan pembukuan akuntansi.

2.3 Laporan Keuangan

2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara, misalnya sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misal : informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018).

Menurut Wahyudiono (2014) Laporan pertanggungjawaban manajer atau pimpinan perusahaan atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya kepada pihak-pihak luar perusahaan. Menurut Sundjaja dan Barlian (2001) dalam Rudiantoro dan Veronica Siregar (2011) laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan atau aktivitas perusahaan.

Penyusunan laporan keuangan disiapkan mulai dari berbagai sumber data, terdiri dari faktur-faktur, bon-bon, nota kredit, salinan faktur penjualan, laporan bank dan sebagainya. Data yang asli bukan saja digunakan untuk mengisi buku perkiraan, tetapi dapat juga dipakai untuk membuktikan keabsahan transaksi. Laporan keuangan terdiri dari (Abrori, 2010) :

1. Neraca, menginformasikan posisi keuangan pada saat tertentu, yang tercermin pada jumlah harta yang dimiliki, jumlah kewajiban, dan modal perusahaan.
2. Perhitungan laba rugi, menginformasikan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu.
3. Laporan Perubahan Modal, Laporan perubahan modal adalah ringkasan tentang perubahan modal yang terjadi dalam suatu periode tertentu.
4. Laporan arus kas, menginformasikan perubahan dalam posisi keuangan sebagai akibat dari kegiatan usaha, pembelanjaan, dan investasi selama periode yang bersangkutan.
5. Catatan atas laporan keuangan, menginformasikan kebijaksanaan akuntansi yang mempengaruhi posisi keuangan dari hasil keuangan perusahaan.

Laporan keuangan diharapkan disajikan secara layak, jelas, dan lengkap, yang mengungkapkan kenyataan-kenyataan ekonomi mengenai eksistensi dan operasi perusahaan tersebut. Dalam menyusun laporan keuangan, akuntansi dihadapkan dengan kemungkinan bahaya penyimpangan (bias), salah penafsiran dan ketidaktepatan. Untuk meminimalkan bahaya ini, profesi akuntansi telah berupaya

untuk mengembangkan suatu barang tubuh teori ini. Setiap akuntansi atau perusahaan harus menyesuaikan diri terhadap praktik akuntansi dan pelaporan dari setiap perusahaan tertentu (Arifin, 2005).

2.3.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan menurut Sawir (2005) dalam Abrori (2010) adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi,
2. Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama oleh sebagian besar pemakainya, yang secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu
3. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
4. Laporan keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan saat ini dan untuk memperkirakan hasil operasi serta arus kas di masa depan.

Dari pengertian di atas tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal suatu perusahaan.

2.3.3 Pengguna Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012) mengemukakan bahwa pengguna laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaganya, dan masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Beberapa kebutuhan tersebut meliputi sebagai berikut:

a. Investor

Penanaman modal berisiko dan penasihat mereka berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas untuk membayar dividen.

b. Karyawan

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas entitas. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas dalam memberikan balas jasa, imbalan pascakerja dan kesempatan kerja.

c. Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

d. Pemasok dan kreditor usaha lainnya

Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada entitas dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka bergantung pada kelangsungan hidup entitas.

a. Pelanggan

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup entitas, terutama kalau mereka terlibat perjanjian jangka panjang dengan atau bergantung pada entitas.

b. Pemerintah

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan

karena itu berkepentingan dengan aktivitas entitas. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas entitas, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

c. Masyarakat

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, entitas dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.

2.3.4 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Dalam melakukan analisa laporan keuangan, penting bagi seorang analisis untuk memahami bentuk-bentuk penyusunannya dan kelemahan dalam menganalisis laporan keuangan tersebut.

Karakteristik yang harus dipenuhi suatu informasi yang ada pada laporan keuangan ditetapkan dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri enam elemen, yaitu :

1. Laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode.
2. Laporan laba komprehensif selama periode.
3. Laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan semua perubahan ekuitas dan perubahan-perubahan yang muncul dari transaksi-transaksi dengan pihak pemegang saham dalam kapasitas mereka sebagai pemilik perusahaan selama periode.
4. Laporan arus kas selama periode.
5. Catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi terkait dengan kebijakan akuntansi yang signifikan dan catatan-catatan penjelasan lainnya pada awal periode.

6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komprehensif yang disajikan apabila suatu entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau apabila entitas mereklasifikasi pos-pos yang ada pada laporan keuangan.

2.3.5 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi penggunanya. Karakteristik kualitatif pokok ada 4 (empat), yaitu :

1. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan **dapat dipahami** oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu

3. Keandalan

Informasi memiliki kualitas andal, jika bebas dari kesalahan material dan bias, dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Laporan keuangan tidak bebas dari bias (melalui pemilihan atau penyajian informasi) jika dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu

4. Dapat dibandingkan

Laporan keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu harus dapat dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Laporan keuangan juga harus dapat dibandingkan dengan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif

2.4 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM)

2.4.1 Gambaran Umum SAK EMKM

SAK EMKM dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah. Dalam SAK EMKM bab 1 poin 2 mengatakan bahwa entitas mikro, kecil dan menengah tanpa adanya akuntabilitas public yang signifikan, seperti yang ditetapkan didalam SAK EMKM, yang memenuhi definisi serta kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana yang diatur didalam perundang-undangan di Indonesia paling tidak selama dua tahun berturut-turut.

Kemudian, menurut SAK EMKM bab 1 poin 3 juga mengatakan bahwa entitas yang tidak memenuhi kriteria serta definisi dari bab 1 poin 2 diizinkan untuk menggunakan SAK EMKM jika otoritas yang terkait mengizinkan (Ikatan Akuntan Indonesia).

2.4.2 Kebijakan Akuntansi menurut SAK EMKM

a. Pengakuan

Dalam bab 2 poin 12, SAK EMKM menjelaskan bahwa pengakuan unsur laporan keuangan adalah proses pembentukan suatu akun dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur sebagaimana diuraikan dalam bab 2 poin 2 dan 2.8, dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut dapat dipastikan akan mengalir ke dalam atau keluar dari entitas, dan
2. Pos tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal.

Menurut bab 2 poin 19 didalam SAK EMKM menjelaskan bahwa dasar akrual digunakan untuk penyusunan laporan keuangan entitas. Didalam dasar akrual, akun-akun diakui sebagai aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk masing-masing akun-akun tersebut.

b. Pengukuran

Menurut SAK EMKM bab 2 poin 15 menjelaskan pengukuran sebagai proses penetapan jumlah uang untuk mengakui aset, liabilitas, penghasilan, dan beban didalam laporan keuangan.

Dasar pengukuran unsur laporan keuangan didalam SAK EMKM adalah biaya historis, ini sesuai didalam bab 2 poin 16. Biaya historis suatu aset adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Biaya historis suatu liabilitas adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang diterima atau jumlah kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal.

c. Penyajian

Bab 3 poin 2 didalam SAK EMKM menyatakan bahwa penyajian wajar mensyaratkan penyajian yang jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi serta kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan, dan beban. Pengungkapan dibutuhkan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu didalam SAK EMKM tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi, peristiwa, dan kondisi lain, atas posisi dan kinerja keuangan entitas.

Kemudian didalam bab 3 poin 3 menjelaskan tujuan penyajian wajar laporan keuangan entitas adalah sebagai berikut:

- 1) *Relevan*: informasi dapat digunakan oleh pengguna untuk proses pengambilan keputusan.

- 2) *Representasi tepat*: informasi dalam laporan keuangan merepresentasikan secara tepat apa yang akan di representasikan dan bebas dari kesalahan material dan bias.
- 3) *Keterbandingan*: informasi dalam laporan keuangan entitas dapat dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Informasi dalam laporan keuangan entitas juga dapat dibandingkan antar entitas untuk mengevaluasi posisi dan kinerja keuangan.
- 4) *Keterpahaman*: informasi yang disajikan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar.

2.4.3 Penyajian Laporan Keuangan Menurut SAK EMKM

2.4.3.1 Laporan Laba Rugi

Menurut SAK EMKM, laporan laba rugi entitas dapat mencakup akun-akun berikut ini:

- (a) Pendapatan
- (b) Beban keuangan
- (c) Beban pajak

Kemudian pada bab 5 poin 4 SAK EMKM menyatakan bahwa laporan laba rugi memasukkan semua penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode, kecuali SAK EMKM mensyaratkan lain. SAK EMKM mengatur perlakuan atas dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian retrospektif terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan.

Sementara itu, laporan perubahan modal merupakan laporan yang memberikan informasi mengenai peningkatan atau penurunan aktiva atau kekayaan pada suatu perusahaan.

2.4.3.2 Neraca atau Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan menyajikan informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan. Pada bab 4 poin 2, SAK EMKM menyatakan bahwa laporan posisi keuangan terdiri dari kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, dan ekuitas.

Kemudian, SAK EMKM menyatakan pada bab 4 poin 4 bahwa SAK EMKM tidak menentukan susunan atas akun-akun yang disajikan. Walaupun tidak ditentukan susunannya, entitas dapat menyajikan akun-akun asset berdasarkan urutan likuiditas dan akun-akun liabilitas berdasarkan urutan jatuh tempo.

2.4.3.3 Catatan Atas Laporan Keuangan

Pada bab 6 poin 2, SAK EMKM menyatakan catatan atas laporan keuangan memuat:

- (a) Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM
- (b) Ikhtisar kebijakan akuntansi
- (c) Informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

Jenis informasi tambahan dan rincian yang disajikan bergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas. Kemudian SAK EMKM menyatakan pada bab 6 poin 4 bahwa catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Tiap-tiap akun didalam laporan keuangan merujuk-silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.

2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Laporan Keuangan

2.4.1 Latar Belakang Pendidikan (X1)

Latar belakang pendidikan disini adalah latar belakang pendidikan formal. Undang-undang Sisdiknas Tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan nasional

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2003)

Menurut penelitian Firmansyah (2014) bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan.

2.4.2 Skala Usaha (X2)

Ukuran perusahaan adalah skala usaha yang dilihat dari total aktiva perusahaan pada akhir tahun, berapa jumlah karyawan yang dipekerjakan dan berapa besar pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode akuntansi.

Rudiantoro dan Siregar (2012) menemukan bahwa skala usaha berpengaruh terhadap persepsi pengusaha terkait pentingnya pembukuan dan pelaporan keuangan bagi usahanya. Keberhasilan UMKM dalam membukukan pendapatan/laporan keuangannya yang dilihat dari periode sebelumnya merupakan indikasi bahwa usaha UMKM tersebut *calculated risk* dan *high return investment*.

2.4.3 Umur Usaha (X3)

Umur usaha dalam hal ini adalah lamanya suatu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) didirikan atau umur dari usaha tersebut semenjak usaha tersebut berdiri sampai pada saat penulis melakukan penelitian ini. Dengan asumsi bahwa semakin lama usaha tersebut berjalan maka akan mengakibatkan adanya perkembangan usaha yang signifikan ke arah yang positif atau negatif. Perkembangan dari usaha tersebut tergantung dari iklim perdagangan dan persaingan yang terjadi di dunia usaha atau pasar. Dan biasanya usaha yang lebih lama berdiri cenderung lebih berkembang karena sudah memiliki banyak pengalaman dalam menjalankan usahanya, dan juga usaha yang memiliki umur

yang bias dibidang mapan lebih dapat bersaing dengan usaha/pelaku UMKM lainnya.

2.4.4 Pengetahuan Akuntansi (X4)

Pengetahuan akuntansi merupakan pengetahuan keakuntansian yang dimiliki pengusaha kecil dan menengah. Menurut IAI akuntansi adalah pengidentifikasian, pencatatan, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian-penilaian dan keputusan yang jelas serta tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Dalam penelitian Dewi (2016) menyatakan bahwa pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Rudiantoro dan Siregar (2012) meneliti tentang kualitas laporan keuangan dan prospek implementasi standar akuntansi bahwa ternyata kualitas laporan keuangan UMKM tidak berpengaruh terhadap jumlah kredit yang diterima UMKM, hal ini dikarenakan masih rendahnya kualitas laporan keuangan UMKM sehingga perbankan masih meragukan relevansi dan keandalan kualitas laporan keuangannya.

Andriani dan Zuliyati (2015) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi (studi pada UMKM kain tenun ikat torso jepara) bahwa terdapat pengaruh signifikan pendidikan terakhir manajer atau pemilik, umur perusahaan dan pelatihan akuntansi terhadap informasi akuntansi sedangkan skala usaha dan masa memimpin perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap informasi akuntansi.

Juniardi (2016) meneliti tentang penyusunan laporan keuangan usaha kecil menengah (UKM) konveksi astra berdasarkan SAK EMKM belum mengimplementasikan Standar Akuntansi Keuangan pada laporan keuangannya, dimana UKM Konveksi ASTRA hanya mencatat kas masuk dan keluar yang

masih sangat sederhana sehingga belum menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM).

Dewi (2016) meneliti tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan laporan keuangan pada usaha mikro kecil dan menengah di Bandar Lampung bahwa latar belakang pendidikan, umur usaha, dan skala usaha berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan sedangkan pengetahuan akuntansi berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan.

Shonhadji, Aghe dan Djuwito (2017) meneliti tentang penerapan penyusunan laporan keuangan pada usaha kecil dan menengah berdasarkan SAK EMKM di Surabaya bahwa rendahnya pendidikan, kurangnya pemahaman teknologi informasi dan kendala penyusunan laporan keuangan.

Primayudia (2017) meneliti tentang penyusunan laporan keuangan usaha budidaya ikan nila di Keramba Sejahter berbasis SAK EMKM bahwa aset biologis hewan ternak berupa ikan nila diakui sebagai persediaan dengan akun ikan nila dan diukur berdasarkan harga pasarnya serta disajikan pada laporan neraca.

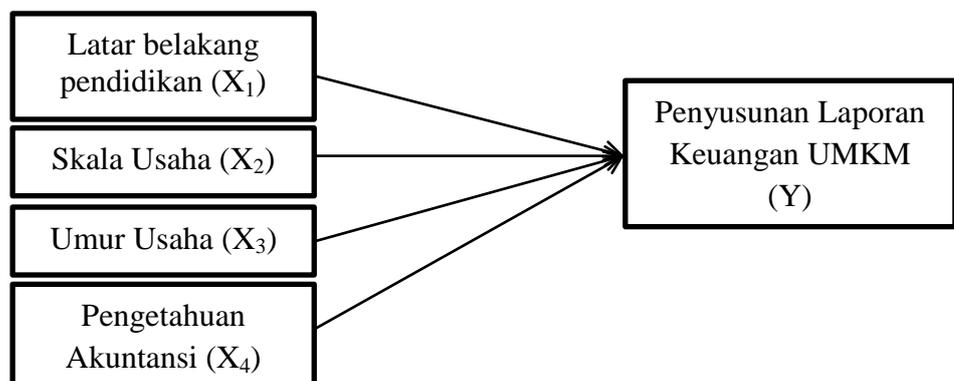
Sartika (2017) meneliti tentang penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pada UKM nisa fashion bahwa Sistem pencatatan keuangan belum sepenuhnya mematuhi dan belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) dan Faktor-faktor yang dihadapi oleh UKM NISA Fashion dalam penerapan laporan keuangan yaitu karena kurangnya pemahaman, kurangnya pengetahuan secara teknis dalam menyusun laporan keuangan, tidak adanya penyuluhan mengenai bagaimana cara penerapan SAK EMKM pada UKM dan kurangnya pengawasan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan.

2.7 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Bandar Lampung. Penulis tertarik mengambil responden UMKM ini karena penulis menilai bahwa banyaknya UMKM yang ada di Kota Bandar Lampung yang semakin berkembang pesat hampir ke seluruh plosok daerah kota Bandar Lampung, namun usaha yang dijalankan oleh para pelaku UMKM masih banyak yang belum memakai pembukuan. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut penulis tertarik meneliti tentang sistem pembukuan dan pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh UMKM di Bandar Lampung tersebut, bagaimanakah proses pencatatan dan penerapan akuntansinya, apakah sistem pembukuannya sudah sesuai dengan SAK EMKM yang dikeluarkan oleh IAI, serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam hal pembukuan akuntansi.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, dapat disusun model kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.8 Bangunan Hipotesis

2.8.1 Latar Belakang Pendidikan berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM

Latar belakang pendidikan disini adalah latar belakang pendidikan formal. Undang-undang Sisdiknas Tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan nasional

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2003). Latar belakang pendidikan pemilik UMKM ataupun karyawan UMKM menentukan sejauh mana pengetahuan tentang penyusunan laporan keuangan pada usaha yang dikelolanya. Penelitian yang telah dilakukan oleh Firmansyah (2014) bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan. Untuk hasil penelitian replikasi yang telah dilakukan oleh Dewi (2016) bahwa latar belakang berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM.

2.8.2 Skala Usaha berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM

Ukuran perusahaan adalah skala usaha yang dilihat dari total aktiva perusahaan pada akhir tahun, berapa jumlah karyawan yang dipekerjakan dan berapa besar pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode akuntansi. Skala usaha merupakan faktor yang sulit dipisahkan dengan lingkungan pengusaha UMKM. Skala usaha yang besar berimplikasi perusahaan mempunyai sumber daya yang lebih besar dan juga lebih mampu mempekerjakan karyawan dengan keahlian yang lebih baik (Gray, 2006). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rudiantoro dan Siregar (2012) menemukan bahwa skala usaha berpengaruh terhadap persepsi pengusaha terkait pentingnya pembukuan dan pelaporan keuangan bagi usahanya. Keberhasilan UMKM dalam membukukan pendapatan/laporan keuangannya yang dilihat dari periode sebelumnya merupakan indikasi bahwa usaha UMKM tersebut *calculated risk* dan *high return investment*. Untuk hasil penelitian replikasi yang

telah dilakukan oleh Dewi (2016) bahwa skala usaha berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan. Sesuai dengan uraian tersebut diatas, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2 : Skala Usaha tidak berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM

2.8.3 Umur Usaha berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM

Lama usaha dalam hal ini adalah lamanya suatu usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) didirikan, lama usaha dikatakan berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan karena semakin lama usaha berdiri semakin berkembang juga pengetahuan yang tertanam pada sumber daya manusia yang ada pada UMKM. Lama berdirinya usaha menjadi salah satu pertimbangan dalam penilaian suatu usaha baik oleh perbankan maupun investor, sebab dari usia usaha ini dapat diketahui business stage dari usaha tersebut beserta track record dari usaha yang dijalani selama ini.

Menurut Kusnia (2013) dalam Tuti dan Dwijayanti (2014) lama usaha adalah waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk hidup yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut eksis dan mampu bersaing dalam pasar sehingga dapat mempertahankan usahanya serta mencapai tujuan yang diinginkan. Penelitian yang dilakukan oleh Tuti dan Dwijayanti (2014) menyatakan bahwa lama usaha berpengaruh signifikan terhadap pemahaman UMKM terhadap laporan keuangan. Untuk hasil penelitian replikasi yang telah dilakukan oleh Dewi (2016) bahwa umur usaha berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang akan dikembangkan adalah sebagai berikut:

H3 : Umur usaha tidak berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM

2.8.4 Pengetahuan Akuntansi berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM

Pengetahuan akuntansi merupakan keakuntasian yang dimiliki pengusaha kecil dan menengah. Menurut IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) akuntansi merupakan pengindentifikasian, pencatatan, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian-penilaian dan keputusan yang jelas serta tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Proses belajar mengenai akuntansi akan meningkatkan pengetahuan akuntansi pengusaha (manager), sehingga pemahaman untuk menerapkan informasi akuntansi juga meningkat. Untuk hasil penelitian replikasi yang telah dilakukan oleh Dewi (2016) bahwa pengetahuan akuntansi berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan. Sesuai dengan uraian tersebut, hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4 : Pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM